



Bajaj Listrik Beroperasi di DKI

Buatan Dalam Negeri, 500 Unit Siap Ujicoba

PERBAIKAN sarana transportasi publik masih jadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya, dengan mengganti 18.000 unit Bajaj dua tak berbahan bakar bensin dan Bajaj berbahan bakar gas (BBG) dengan bajaj berbahan bakar listrik yang lebih hemat dan efisien serta ramah lingkungan.

Untuk tahap awal, sebanyak 500 unit Bajaj listrik siap diluncurkan untuk melayani warga Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan banyak persoalan yang ditimbulkan oleh Bajaj, terutama yang berjenis dua tak.

Mulai dari faktor keselamatan, karena Bajaj memang sudah tidak layak jalan dan tidak memiliki surat izin. Kemudian, juga ada permasalahan terhadap polusi udara, yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan roda tiga tersebut.

"Diharapkan dengan penggunaan Bajaj bertenaga listrik, semua persoalan yang sebelumnya melilit moda transportasi Bajaj bisa diatasi," ujar pejabat yang akrab disapa Ahok itu ■

Itu dia katakan saat menjajal mengendarai Bajaj listrik atau disebut Batik bersama Direktur PT Arrtu Mega Energie, Christoforus Richard selaku produsen Bajaj listrik, di Balaikota dan Monas, kemarin (6/1).

Ahok juga mengaku mengapresiasi rencana peremajaan Bajaj listrik, karena kendaraan roda tiga itu merupakan produksi dalam negeri. Seluruh perangkat dirancang di Cawang, Jakarta Timur. Setiap hari perusahaan itu bisa memproduksi 10 unit Bajaj listrik. Menurut Ahok, Bajaj berkekuatan listrik 2.000 watt dengan dayanya proses charging selama lima jam itu, sangat efisien dan layak dioperasikan.

"Saya apresiasi dan menginstruksikan agar para sopir Bajaj dua tak dan beralih ke Bajaj listrik," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Namun begitu, Ahok mengingatkan

agar dihindari permasalahan pengadaan Bajaj listrik yang hanya dimenangkan beberapa perusahaan saja.

Selain itu juga harus dicegah munculnya monopoli yang mewajibkan para pengendara Bajaj membeli suku cadang dan operasi dari mereka juga. "Model listrik bagi kami sederhana, yang bawa Bajaj boleh bawa kendaraan apa saja asal tidak dua tak lagi. Asal jangan monopoli pas beli," terangnya.

Sementara itu, Dirut PT Arrtu Mega Energie, Christoforus Richard mengatakan, pihaknya menawarkan produk Bajaj listrik kepada Pemprov DKI dan meminta dukungan untuk surat izin. Pasalnya, hanya 18.000 Bajaj yang ada saat ini beroperasi di DKI yang memiliki surat izin resmi.

"Kita maunya yang punya langsung Bajaj listrik ini tukang Bajaj-nya. Satu orang satu. Nanti kalau sudah satu tahun dia memberikan *performance* yang bagus, baru dia bisa bawa lima teman. Tahun kedua nanti punya dia," ujarnya.

Lebih jauh kata Richard, pihaknya sudah menyiapkan 500 unit Bajaj. Rencana ke depan, produksi 300 unit per bulan akan dilakukannya.

Ia menjelaskan, dinamo atau mesin penggerak Bajaj listrik itu berasal dari Tiongkok. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk perakitan Bajaj listrik semuanya kandungan lokal.

"Bajaj listrik ini lebih unggul dari BBG. Bajaj BBG setoran sehari Rp 120.000. Beli BBG Rp 35.000. Kalau Bajaj listrik ini setiap hari cuma perlu nge-charge dalam lima jam. Setelah penuh, bisa jalan lima jam dengan 120-150 kilometer," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Johny Simanjuntak menilai positif rencana penggunaan Bajaj listrik. Menurutnya, banyak nilai positif yang

bisa diambil masyarakat jika Bajaj itu dioperasikan. "Kami di DPRD DKI mendukung penuh rencana tersebut," katanya.

Namun begitu, Johny mengingatkan agar Pemprov DKI konsisten dengan program tersebut. Jangan hanya bertahan sehari dua hari saja, namun harus penerapan dilakukan secara terus menerus. "Jangan sampai Bajaj listrik ini munculnya saat peluncuran saja. Sedangkan pada penerapannya, lagi-lagi Bajaj dua tak yang beroperasi," cetusnya. (wok)





Sejarah Bajaj di Ibu Kota

Tahun 1975: Bajaj digunakan sebagai transportasi di Jakarta atas prakarsa importir asal India. Nama pabrikan kendaraan roda dua itu adalah Bajaj Auto.

Tahun 1980: Impor Bajaj dari India dihentikan karena jumlahnya sudah mencapai 13.335 unit yang beroperasi di Ibu Kota.

Tahun 1992: Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggulirkan program langit biru. Salah satunya menasar Bajaj agar menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Tahun 2005: Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara termasuk mengganti bahan bakar Bajaj.

Tahun 2006: Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengeluarkan surat keputusan yang menunjuk PT Abdi Rahardja meremajakan Bajaj. Perusahaan itu bekerja sama dengan pemilik dan pengusaha Bajaj di Ibu Kota.

Tahun 2007: Peraturan Gubernur (Pergub) No 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah

Tahun 2008: Pemprov DKI meremajakan Bajaj oranye sebanyak 14.424 unit. Dari rencana 5.000 unit Bajaj oranye, baru 750 unit berhasil diremajakan jadi Bajaj biru menggunakan BBG.

Tahun 2011: Pemprov DKI kembali meremajakan Bajaj oranye menjadi Bajaj BBG sebanyak 2.755 unit.

Tahun 2012: Dishub DKI Jakarta menggelar lelang program peremajaan Bajaj BBG berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tahun 2013: Dari total 14.424 unit Bajaj oranye yang beroperasi di Jakarta baru 5.000 unit yang diremajakan jadi Bajaj BBG.

Tahun 2014: Pemprov DKI kembali berencana meremajakan 9.424 Bajaj oranye yang ada di Ibu Kota. Hingga kini program masih bergulir.

Tahun 2015: Pemerintah Provinsi DKI berencana mengganti 18.000 unit Bajaj yang menggunakan BBM dan Bajaj BBG dengan Bajaj listrik.

ANGGA/INDOPOS